

KETUA M.P.R.S.

Djenderal Dr. A. H. Nasution

Assalamu'alaikum w. w.

Bapak Rektor, Bapak2 para Mahaguru, para Dosen, adik2 para Mahasiswa dan Saudara para hadlirin sekalian.

Permintaan Bapak Rektor I.A.I.N. Sunan Kalidjaga kepada saya untuk menghadliri dan memberi amanat pada Dies Natalis ke-VII-IAIN Sunan Kalidjaga jang diadakan ini hari, menjesal sekali saja tidak dapat hadlir sendiri, berhubung keadaan belum mengidzinkan. Hanja dengan perantaraan pembantu saja, saja sampaikan amanat atau pesanan tertulis untuk dapatnja dimanfaatkan dalam Dies Natalis ini.

Pertama, saja sampaikan selamat atas Dies Natalis ke-VII-IAIN Sunan Kalidjaga ini, seraja berpengharapan dan berdo'a semoga pada tahun2 selandjutnja IAIN ini lebih madju, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masjarakat Islam dan umat Indonesia pada umumnja.

Kedua, perkenankanlah pada saat jang sangat berharga ini, saja menjampaikan pokok persoalan jang saja anggap perlu diketahui oleh para Mahasiswa dan masjarakat pada umumnja, jaitu: Gagasan garis besar haluan Negara sesudah pemilihan umum.

Hadlirin sekalian!

Marilah kita tindjau bersama persoalan tersebut.

I. PENGERTIAN HALUAN NEGARA.

1. Manipol berisi persoalan2 pokok dan usaha2 pokok Revolusi dan berlaku tanpa batas waktu tertentu.
2. Dalam melaksanakan UUD '45 Konsekwen, Sidang Umum IV dan Sidang Istimewa MPRS menentukan :
 - 2.1. Rakjat menentukan tiap 5 tahun via MPRS Haluan Negara dalam arti PROGRAM UMUM.
 - 2.2. Manipol tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta perlu diganti; dan Pimpinan serta BP. MPRS ditugaskan untuk menjiapkan KONSEPSI.

Atas dasar itu, berhubung Pemilihan Umum tahun 1968 jang akan datang setjara praktis berarti membuat PROGRAM 5 tahun sesudah Pemilihan Umum, jang nanti akan diserahkan kepada MPR.

2. 3. Tentang persoalan2 pokok revolusi kita yakni Ideologi, Dasar Tujuan dan Usaha2 pokok, sebenarnya telah termuat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD '45. MPR melengkapinja dengan landasan2 kebidaksanaan dibidang Dalam Negeri, Luar Negeri, EKUBANG, SOSBUD dan HANKAM sebagaimana telah dikerdjakan oleh Sidang Umum ke-IV MPRS jang seperlunya tiap 5 tahun dapat diperbaharui atas dasar perkembangan situasi dan kondisi.

Atas dasar itu MPR tiap 5 tahun djuga menetapkan PROGRAM KERDJA NEGARA, dibidang2 tersebut dan memilih PRESIDEN SEBAGAI PELAKSANAANNJA. Inilah sistim UUD '45, Demokrasi Pantjasila. Beda dari sistim liberal atau Negara2 Sosialis, jang partai2 berkampanje dengan ideologi dan programnja, jang mana setelah menang pemilihan umum otomatis djadi program Negara.

2. 4. Djadi menurut Sidang Umum ke-IV MPRS : „Garis2 Besar Haluan Negara menurut UUD '45 adalah Program Umum jang harus dilaksanakan oleh Pemerintah.”

Program adalah planning jang telah dikaitkan dengan faktor waktu.

Haluan Negara (planning) adalah salah satu unsur pokok dari tiga unsur pokok sosialisme ; planning, production dan distribution.

Oleh karena itu dalam Negara sosialis atau dalam Negara jang menudju sosialisme, Haluan Negara harus ada.

Memang tidak mungkin tertjapai kemakmuran (production) jang terbagi adil (distribution) keseluruh masjarakat djika tidak ada planningnja.

2. 5. Dimasa revolusi fisik kita tidak sempat menjusun Haluan Negara dalam arti program umum.

Memang pada waktu itu kebutuhan akan Haluan Negara belum terasa mendesak karena seluruh kegiatan bangsa ditjuraikan pada penghantjuran kolonialisme setjara fisik.

Pada periode 1950—1959 kita belum memiliki Haluan Negara, tetapi tjita2 perdjjuangan Bangsa Indonesia jang terkandung dalam pembukaan UUD '45 telah dilaksanakan dengan tjara jang berazaskan liberalisme.

Ternjata pelaksanaannja setjara liberal tersebut tidak membawa kemanfaatan bahkan melahirkan kekatjauan2 disegala bidang kehidupan.

Pada periode 1959—1965 kita telah menetapkan Haluan Negara jaitu Manipol jang materinja maupun pelaksanaannja menggunakan azas2 Marxis.

Dengan methodé Marxis ini ternyata tjita2 Bangsa Indonesia tidak semakin dekat tertjapainja, melainkan mendjadi berantakan tidak menentu dengan puntjaknja terdjadinja pengchianatan PKI dan penjelewengan dalam bentuk optimal dari Orde Lama terhadap Pantjasila dan UUD '45.

Berdasarkan pengalaman2 tersebut maka selain Haluan Negara pengganti Manipol jang hendak disusun harus benar2 berdasarkan Pantjasila dan UUD '45, methodé pelaksanaannja (azas2 pelaksanaannja) djuga harus benar2 berdasarkan Pantjasila dan UUD '45, methodé atau azas jang demikian dapat kita sebut methodé DEMOKRASI PANTJASILA.

2. 6. PENGERTIAN REVOLUSI, sebagai IDEOLOGI, sebagaimana dalam Marxisme/Leninisme, dilarang oleh Tap. MPRS No. XXV, yakni adjaran revolusi permanen jang bersumber pada adjaran pertentangan klas. Revolusi tersebut adalah bentuk konkrit daripada kontradiksi antara klas-proletar dan klas-bordjuis dan baru akan selesai pada saat klas bordjuis diseluruh dunia hantjur dan berdirinja masjarakat komunis. PENGERTIAN REVOLUSI SEBAGAI HAKEKAT, sebagai umwertung aller werte, telah kita kerdjakan sedjak Proklamasi '45.

MANIPOL jang disistimatisir, diperintji oleh D.P.A. panitya Aidit, menganut pengertian revolusi sebagai ideologi, jaitu terbukti dengan uraiannja bahwa revolusi adalah rentetan konfrontasi jang terus-menerus. Dan sebagai konsekwensinja Manipol djuga mentjip-takan dua golongan klas jang berkonfrontasi terus-menerus, sesuai dengan dialektika materialisme jang mendalilkan bahwa kontradiksi merupakan pengaruh daripada perkembangan materi menudju perubahan kwalitasnja.

Selama masa Manipol, Rakjat Indonesia selalu dalam keadaan konfrontasi terus-menerus termasuk konfrontasi antar golongan dalam masjarakat sendiri. Keadaan jang demikian selain tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pembangunan, djuga merupakan keadaan jang aman untuk excuse bagi kegagalan2 para Pimpinan Negara dan Pimpinan masjarakat, bahkan menindas social controle dari rakjat dengan mentjap sebagai kontra revolusi.

Dalam masjarakat jang sedang berkembang (termasuk Indonesia) dimana peralatan dan perlengkapan Negara dan ketjakapan masjarakat termasuk apparaturnja belum fixed, tidak mungkin dilaksanakan perdjjuangan setjara konvensional evolusioner, melainkan harus setjara

revolusioner (dalam arti metode kerja) atau non konvensional dinamis. Tegasnya perjuangan Bangsa Indonesia mentjapai tjita2-nja harus setjara revolusioner dalam arti berjuang, dan tidak dalam arti ber-revolusi menurut ajaran komunisme.

2. 7. Sistematik Manipol dan masalah2 jang diatur dalam Manipol adalah-hampir identik dengan hasil konggres Nasional PKI jang ke-V bulan Maret 1954. Satu2nja perbedaan jang prinsipiel antara Manipol dan hasil konggres P.K.I. jang ke-V tersebut adalah tentang kepemimpinan revolusi :
— Manipol tidak mensjatkan bahwa kepemimpinan revolusi harus dipegang oleh kelas buruh.

— Sedang kongres Nasional ke-V PKI, hal itu merupakan pensjatan. Hal ini telah diberi djawaban oleh Aidit pada kuliahnja disekolah Partai di Peking tanggal 2 September 1963, bahwa :

"Tidaklah dapat diharapkan bahwa masalah pimpinan kelas buruh dapat dirumuskan dalam Manipol. Manipol hanya sampai menjatakan bahwa kaum buruh dan kaum tani merupakan soko-guru revolusi, dan tidak berkata apa2 tentang kelas mana jang mempunyai tugas sedjarah memimpin revolusi."

II. GARIS BESAR HALUAN NEGARA SESUDAH PEMILIHAN UMUM

Garis besar Haluan Negara sesudah Pemilu berpangkal dan melandjutkan Garis Besar Haluan Negara sekarang, berlandaskan hasil2 Sidang Umum ke-IV MPRS.

1. Garis Besar Haluan Negara cq. Program tahap ini ialah **DWI DARMA/TJATUR KARYA KABINET AMPERA, POKOKNJA STABILISASI. TAHAP STABILISASI** ini adalah untuk memungkinkan **TAHAP PEMBANGUNAN**, jang tingkat ke-satunja ialah program 5 tahun sesudah Pemilu.
2. **TAHAP STABILISASI** harus ditjapai pada Pemilu j.a.d. Tahap Stabilisasi ini adalah meruntuhkan Orba dan menegakkan Orba. Intinja ialah menegakkan **KEBENARAN** dan **KEADILAN**, via penegakan kehidupan **KONSTITUSI** dan **HUKUM** dan **USAHA PERBAIKAN HIDUP RAKJAT**. Tahap stabilisasi mengachiri tahap pergolakan sosial-politik dan membuka djalan ketahap pembangunan sosial ekonomi. Sebenarnja setelah sukses perang kemerdekaan 45-50, haruslah kita mulai stabilisasi untuk dapat melangkah kepada Pembangunan masjarakat adil dan makmur. Tetapi **KEPEMIMPINAN NASIONAL** kita telah gagal dalam stabilisasi,

bahkan menjeleweng dari Pantjasila/UUD '45, membawa liberalisme, kemudian Marxisme dan kultus individu, bahkan dengan itu pada kenjataanja melahirkan NEO-FEODALISME dengan durno-ismenja, bersekutu dengan NEO-IMPERIALISME PKI/RRT, jang berpuntjak pada pengchianatan Lubang Buaja. Inilah Orla.

Karena itu, Angkatan '66 melahirkan Orde Baru jang meruntuhkan Orde Lama tersebut via Super Semar, via SU. ke-IV dan S.I. MPRS sehingga terdjebollah semua hambatan dan penjelewengan fisik/politik/konstitasionil.

S.I. MPRS mendjebol benteng terachir Orde Lama.

Sesudah S.I. MPRS itu dapatlah dilaksanakan REHABILITASI menudju STABILISASI POLEKSOS jang sebenarnja, berarti meng-ORBA-kan disegala bidang ditingkat NEGARA dan MASJARAKAT. Disatu pihak mengikis habis sisa2 Orla dan dilain fihak MODERNISASI, PEMBAHARUAN KEHIDUPAN POLEKSOS SETJARA MENDASAR dan MENJELURUH, bukan sekedar ganti pemimpin. Tapi adalah ganti POLA dan STRUKTUR, jang sebenarnja adalah: "MULAI SUNGGUH2 MELAKSANAKAN TJITA2 PROKLAMASI '45".

Kabinet Ampera harus kita sukseskan, untuk mentjiptakan stabilisasi untuk take off pembangunan masjarakat adil/makmur, berarti "pembangunan ketjerdasan dan kemakmuran setjara bertahap-tahap 2 a 5 tahun jang mendatang sesudah Pemilu".

III. GAGASAN TENTANG ISI PROGRAM 5 TAHUN SESUDAH PEMILU

Dalam membahas program 5 tahun demikian, ada dua bidang jang harus digarap jaitu :

- ke-1. Memberikan sarana2 jang wadjar, sebagai sjarat untuk suksesnja pelaksanaan program2 Pemerintah.
- ke-2. Tudjuan program umum 5 tahun itu meliputi bidang2 DALAM NEGERI, LUAR NEGERI, EKUBANG, SOSBUD, HANKAM dan lain2.

Dalam hal sarana2 jang wadjar, perlu didahulukan :

- Perbaiki apparatur Negara sebagai pelaksanaan dibidang executif, legislatif, dan judikatif.
- Effisiensi struktur dan prosedur Kabinet berdasarkan UUD '45.
- Modernisasi Pedesaan sebagai unit2 dasar Negara dan masjarakat.
- Keseimbangan fungsi dan tugas antara Pusat-Daerah-Desa, untuk pengembangan swadaja jang maximal.

— Melembagakan perentjanaan dan pengawasan dalam kegiatan2 Negara, untuk mendjamin integritas2 dan pendjabat Negara.

Dimasa2 j.l. hal ini biasanja diabaikan, sehingga kita alami in-effisiensi, salah urus dan korupsi jang meningkat.

Dalam melaksanakan program umum 5 tahun jang meliputi semua bidang itu, perlu diutamakan bidang sosial, ekonomi/pergaulan hidup-rakjat.

IV. GAGASAN TENTANG STRUKTUR KABINET DAN DJAMINAN TATA USAHA MENURUT UUD '45.

1. Presiden/Wakil Presiden selaku penjelenggara kekuasaan Pemerintah Negara tertinggi dibawah MPR, memimpin Kabinet (concentration of power and responsibility upon the President) dan oleh karenanja tidak diperlukan adanja Presidium Kabinet.
2. a. Sesuai dengan demokrasi Pantjasila jang mengutamakan hikmah kebidjaksanaan permusjawaratan, perlu diadakan Dewan2 musjawarah jang bertugas menentukan kebidjaksanaan umum jang integral dan tepat serta bersifat saran kepada Presiden/Wakil Presiden tanpa mengurangi tanggung-djawab sebagai Menteri-Menteri setjara konstitutionil.
b. Dewan musjawarah pada tingkat teratas adalah setingkat Menteri Utama dalam Kabinet Ampera sekarang dan diketuai oleh Presiden/Wk. Presiden jang berang-gautakan :
 - = unsur ex-offisio/Menteri2 jang bersangkutan,
 - = unsur ilmiah,
 - = unsur praktisi dalam masjarakat.

Keanggautaan Dewan musjawarah tidak bersifat politik. Dewan2 ini memegang kekuasaan policy dan mengintegrasikan bidang2 SOSBUD, EKUBANG, KAMNAS, D. N., dan L.N., policy KAMNAS, serta mengkoordinasi/mengawasi eksekusi jang harus dilaksanakan oleh Menteri KAMNAS, dibidang Militer, dan oleh Menteri2 lain dibidangnja masing2.

- c. Pada tingkat Menteri dan Direktur Djenderal diadakan pula Badan2 Musawjarah jang diketuai oleh Menteri/Dirdjen jang bersangkutan.
Tugas, komposisi dan sifat2 konform dengan Dewan Musjawarah.

3. Djumlah Departemen dieffisienkan.

Djumlah Departemen disederhanakan dengan hanja membentuk Departemen bagi fungsi2 pemerintahan jang membutuhkan organ2 pelaksana kebawah, sedang bagi fungsi2 pemerintahan jang hanja dibutuhkan ditingkat pusat dibentuk "BOARDS" atau panitya2 tetap, karena hanja bertugas policy. Koordinasi dan supervisi, seperti koperasi, transmigrasi dan lain-lain.

4. Djabatan Direktur Djenderal kebawah seharusnya adalah jabatan karier pilihan atas keachlakan, keahlian dan kepemimpinan.

Sistim jabatan karier ini untuk mendjamin integritas, kontinuitas dan stabilitas apparatur pemerintahan.

V. RE-ORGANISASI

Sebagai Negara Kesatuan perlu reorganisasi vertikal dengan memperhatikan pedoman2 pokok TAP. MPRS XXI/66 di bidang struktural dan TAP. MPRS XXIII/66 di bidang Ekubang, serta TAP. XXVII dan XXVIII bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan sosial serta Resolusi Pembinaan Kesatuan Bangsa.

1. Harus diutamakan disamping efisiensi Kabinet, sebagai puntjak nasional, ialah APPARATUR PEDESAAN sebagai sendi2 Negara dan masjarakat. Perlu suatu-fungsi dan struktur DASWATI III menurut wilajah ketjamatan jang kongruen dengan pimpinan nasional, bertjabang kepada rukun kampung, rukun tetangga dan keluarga.

Daswati III haruslah djadi unit2 otonoom jang bisa tjukup berdikari.

2. Adapun eselon Daerah Tingkat I dan II hendaknya disederhanakan/dieffisienkan dengan titik serta fungsinya sebagai support terhadap pusat dan Daswati III, chusus dalam span of controle, dan jang mengutamakan sifat teknis diatas politis.

Untuk tugas2 politis jang terutama ialah Legislatif dan budget DPR, kedua tingkat inilah jang melakukan, jang susunan dan pemilihannya bisa lebih sederhana.

Dalam Negara Kesatuan, jang terpenting ialah eselon teratas dan terbawah; beda dengan Negara Federal jang mengutamakan eselon daerah/Negara bagian.

Namun geografis dan sedjarah Nusantara kita memerlukan eselon tengah jang politis berwibawa; di Djawa umumnya Kabupaten2. Sedang diseberang (Luar Djawa) umumnya daerah Karesidenan.

Hadlirin sekalian!

Demikianlah persoalan jang saja anggap penting dan perlu diketahui oleh masjarakat terutama oleh para Mahaguru, para Dosen dan para Mahasiswa.

Sebagai penutup, sekali lagi saja sampaikan "Selamat Ber-Dies-Natalis" Tuhan selalu menjertai kita.

Sekian, terima kasih.

Wassalam w. w

Djakarta, 10 Djuni 1967.

KETUA MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA

ltd.

DR. A. H. NASUTION
DJENDERAL TNI.

Para penulis dalam nomer ini ad.:

- H. M. Salim Fachry — Ketua Djurusan Bahasa Arab pada Fakultas Tarbijah IAIN „Sjarif Hidajatullah” Djakarta.
- A. Razaq Al Amudy — Pembantu Dekan pada Fakultas Adab IAIN „Sunan Ampel” Surabaya.
- Drs. Soemadi Soerjabrata — Ketua Djurusan Ilmu Pendidikan pada Fakultas Tarbijah IAIN „Sunan Kalidjaga”, Jogjakarta.
- Drs. Zuber Usman -- Dosen Bahasa Indonesia pada Universitas „Indonesia” dan IAIN „Sjarif Hidajatullah” Djakarta.